

PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI DISTRIK MIMIKA BARU KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA TENGAH

Juan Kahlil Gandeguay

NPP 30.1484

Asdaf Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email : 30.1484@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi : Dr. Drs. H. Ondo Riyani, M.Si

ABSTRACT

Problem/Background (GAP) : *This research is entitled "Women's Political Participation in Regional Head Elections in Mimika Baru District, Mimika Regency, Central Papua Province". The female population, which is almost comparable to the male population, is inversely related to political participation in Mimika Baru District. The lack of women's involvement in politics that occurred in Mimika Baru District itself is the focus of researchers to increase women's political participation. **The purpose :** to determine women's political participation in regional elections in Mimika Baru District, Mimika Regency and what factors influence this political participation. **Method:** This research is a type of qualitative research with descriptive analysis method. The data were obtained based on the results of the author's research which came from the Mimika Regency KPU and the Mimika Baru District Office and conducted interviews and documentation. The data were analyzed using the theory of political participation by Samuel P Huntington. **Result:** The level of women's political participation in Mimika Baru District has increased with the involvement of women in outreach and committees ahead of the 2024 election. The factors that influence women's political participation are technical, occupational, socialization, administrative and political factors. **Conclusion:** Political participation has increased and the factors that influence it are known, including technical, employment, socialization, administrative and political.*

Keywords: *Pilkada, Political participation, Women*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Penelitian ini berjudul “Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilihan Kepala Daerah di Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah”. Jumlah populasi perempuan yang hampir sebanding dengan laki-laki justru berbanding terbalik dalam partisipasi politik di Distrik Mimika Baru. Kurangnya keterlibatan perempuan dalam perpolitikan yang terjadi di Distrik Mimika Baru sendiri menjadi fokus peneliti untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan tersebut. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi politik perempuan pada pilkada di Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika dan faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi politik tersebut. **Metode Penelitian:** Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Data diperoleh berdasarkan hasil penelitian penulis yang bersumber dari KPU Kabupaten Mimika dan Kantor Distrik Mimika Baru serta dilakukannya wawancara dan dokumentasi Data tersebut dianalisis menggunakan teori partisipasi politik oleh Samuel P Huntington. **Hasil Penelitian:** Tingkat partisipasi politik perempuan di Distrik Mimika Baru telah mengalami peningkatan dengan adanya keterlibatan perempuan dalam sosialisasi maupun kepanitiaan menjelang pelaksanaan pemilu 2024. Adapun faktor yang mempengaruhi partisipasi politik perempuan tersebut adalah faktor teknis, pekerjaan, sosialisasi, administratif dan Politik. **Kesimpulan:** Partisipasi politik telah mengalami peningkatan dan mengetahui faktor yang mempengaruhinya antara lain teknis, pekerjaan, sosialisasi, administratif dan Politik.

Kata kunci : Pilkada, Partisipasi politik, Perempuan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum keterlibatan warga negara dalam ikut mempengaruhi pengambilan keputusan dan mempengaruhi kehidupan bangsa relatif sangat kecil dalam masyarakat tradisional dimana sifat kepemimpinan politik lebih banyak ditentukan oleh sekelompok elit penguasa. Minimnya partisipasi atau keterlibatan warga menjadi kendala bagi pemerintah dalam mengembangkan sektor kehidupan masyarakat dan menerapkan konsep pembangunan. Partisipasi dijadikan tolok ukur seberapa disukai sistem politik suatu negara. Kemakmuran dan pembangunan suatu bangsa, apapun jenis kelaminnya, sangat bergantung pada keterlibatan warganya, baik laki-laki maupun perempuan.

Sejarah perpolitikan di Indonesia dan negara berkembang pada umumnya menunjukkan bahwa perempuan baru belakangan ini mulai berpartisipasi dalam politik. Stigma yang diasosiasikan dengan perempuan yang memegang kekuasaan politik di negara ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya keterwakilan perempuan dalam politik. Masih sedikitnya perempuan yang menduduki jabatan publik menjadi salah satu indikatornya.

Keikutsertaan perempuan dalam politik nasional harus mendapat perhatian yang serius. Tingkat partisipasi perempuan dalam lingkup legislatif maupun eksekutif masih sangat minim. Tingkat keterlibatan perempuan dan faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi politik mereka menjadi perhatian para peneliti. Dalam hal partisipasi dan keterwakilan politik, pengaruh perempuan dapat menentukan seberapa efektif mereka dalam membuat

keputusan yang melindungi hak-hak mereka sebagai kelompok dan hak-hak komunitas yang lebih besar, serta bagaimana mengalokasikan berbagai sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan standar kehidupan. hidup.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Meluasnya sikap apatis dan tidak menggunakan hak pilih merupakan fenomena yang terjadi secara nasional, tidak hanya di Mimika. Tentu saja, sejauh ini merupakan kajian yang menarik untuk melihat bagaimana partisipasi perempuan dalam proses pemilihan di Kabupaten Mimika. Maka dari itu, pemilih perempuan perlu meningkatkan kesadaran demokrasi dengan memajukan partisipasi politiknya karena partisipasi politik mereka dapat mempengaruhi kebijakan kedepannya terutama menyangkut hak-hak perempuan.

1.3 Penelitian Terdahulu

Menurut temuan penelitian Susanti (2013), partisipasi politik perempuan sangat rendah karena beberapa faktor, antara lain kurangnya keterlibatan KPU Kabupaten Mandau dalam menyosialisasikan tata cara pemilihan yang menyebabkan perempuan terhambat dan tidak mengetahui bagaimana menggunakan hak pilihnya. Selanjutnya penelitian Partisipasi Pemilih Perempuan Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Kecamatan Siau Barat Selatan. Pemilih perempuan di Kabupaten Siau Barat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain informasi dan pengetahuan dari partai, proses pemilihan, dan pembentukan partisipasi politik di Kabupaten Siau Barat melalui sosialisasi dan berbagai informasi yang diterima dan dikelola di kalangan pemilih perempuan. Adapun penelitian oleh M. Azhar Sa'ban, Awar Sadat, Mastia (jurnal 2019), angstan politik dari media massa, KPU yang aktif dalam tugas meningkatkan partisipasi politik masyarakat, karakteristik pribadi melalui pendidikan agama, kondisi politik yang tidak tertekan, dan KPU yang aktif dalam tugas meningkatkan partisipasi politik di masyarakat adalah faktor pendorong partisipasi masyarakat.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Keikutsertaan perempuan dalam politik nasional harus mendapat perhatian yang serius. Mengambil lokus di Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika yang tergolong masih kurangnya tingkat partisipasinya, bahkan jumlah yang tidak menggunakan hak pilihnya lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pemilih di 16 distrik lainnya. Memang data pemilih perempuan lebih banyak dari pada laki-laki, akan tetapi partisipasi politik tidak hanya sebatas memberikan suara dan hak pilihnya melainkan representasi dengan turut andil dalam dunia politik.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi partisipasi politik perempuan di Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika dan untuk meningkatkan tingkat partisipasi politik perempuan dalam pemilihan kepala daerah di Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika.

II. METODE

pengumpulan data adalah tujuan utama dari penelitian ini, metode pengumpulan data sangat penting dalam penelitian kualitatif. Pengumpulan data pada dasarnya adalah merupakan sebuah produser yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi karena objek yang akan diteliti

sudah dilaksanakan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan kehadiran kaum perempuan sejauh ini dalam kancah perpolitikan pada umumnya hanya dalam bentuk kampanye dan pemberian hak suara. Pemberian suara merupakan bentuk partisipasi politik yang dilakukan dengan cara datang ke TPS untuk mencoblos pasangan calon yang di dukungnya. Dan kampanye merupakan sarana pesta demokrasi yang bertujuan sebagai kegiatan menyampaikan informasi dan menyampaikan visi misi serta program kerja calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sehingga menarik perhatian pemilih untuk memilihnya. Dan pemberian hak suara pada pemilihan adalah sebuah sarana bagi masyarakat memilih apa yang menjadi harapannya melalui siapa yang ia pilih. pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah masyarakat secara penuh memegang haknya dalam menentukan siapa yang ingin mereka pilih untuk memimpin negara. Sehingga hak penuh tersebut di tuangkan dalam bentuk partisipasi politik yang dianalisis menggunakan teori partisipasi politik Huntington & Nelson. Faktor yang melatarbelakanginya perilaku masyarakat (pemilih) membuat keputusan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang dianggap dapat menampung dan mewujudkan impian serta harapan-harapannya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi politik perempuan agar pilkada Kabupaten Mimika berjalan dengan baik. Keberhasilan suatu pelaksanaan pemilihan umum dapat ditunjukkan dengan tingkat partisipasi politik masyarakat. Semakin tinggi tingkat partisipasi politik masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran terhadap politik yang tinggi. Sebagian besar perempuan Distrik Mimika terdorong untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan Bupati karena mereka menginginkan pemimpin yang mampu membawa perubahan dan kemajuan bagi masyarakat. Ada baiknya mendorong dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pemilihan umum ini melalui faktor pendekatan antara pasangan calon dengan masyarakat. Masyarakat berharap pasangan calon dapat memahami dan memahami persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat di Mimika dengan pendekatan yang dilakukan oleh pasangan calon kepada masyarakat. Kedekatan ini bermanfaat untuk menyebarkan informasi tentang pemilu dan memikat pendukung untuk mencoblos calon bupati pada hari pemilihan.

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Mimika merupakan salah satu dari sekian banyak pemerintahan yang ada di Provinsi Papua Tengah yang terletak di wilayah Pesisir Selatan, dimana sebelumnya Mimika merupakan kecamatan dari Kabupaten Fakfak dan daerah tersebut dikenal dengan Kabupaten Mimika Timur. Dengan bertambahnya jumlah penduduk daerah potensial tersebut serta bertambahnya tugas dan tanggung jawab di bidang pemerintahan, maka dipandang perlu untuk membentuk suatu pemerintahan daerah administrasi khusus, maka diangkatlah pemerintahan Pembantu Bupati Daerah Fakfak Mimika sebagai Daerah Administratif Khusus oleh Menteri Dalam Negeri di Jayapura pada tanggal 8 Oktober 1996. Setelah ditetapkan sebagai Daerah Administratif Khusus, ditetapkan daerah kabupaten yang meliputi: Distrik Mimika Timur, Mimika Agimuga Barat, dan Pemekaran Kabupaten Mimika baru yang berlokasi di Timika. Setelah kurang lebih (empat) tahun menjalankan Pemerintahan Daerah Administratif, pada tanggal 18 Maret 2000, perubahan status dari Daerah Administratif Khusus menjadi Kabupaten akhirnya diresmikan oleh Gubernur Provinsi Papua, Drs. JP Salossa, M.Si berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Setelah resmi menjadi kabupaten definitif, pada tanggal 18 Juni 2001 pemerintah daerah resmi membentuk 12 Kecamatan (atau sekarang sudah berubah

menjadi Kecamatan). menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Mimika. Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Mimika Baru, Kuala Kencana, Tembagapura, Mimika Timur, Mimika Timur Jauh, Mimika Tengah, Mimika Barat, Mimika Barat Tengah, Mimika Barat Jauh, Agimuga, Jila dan Jita.

3.2 Gambaran Distrik Mimika Baru

Distrik Mimika Baru merupakan salah satu Distrik Induk dan menjadi Ibukota Kabupaten Mimika yang sementara beralamat di Ruko Bintang Laut Jalan Poros SP2 - SP5. saat ini Distrik Mimika Baru terdiri 11 Kelurahan dan 3 Desa/ Kampung. Distrik Mimika Baru memiliki luas 2,261(km²) atau memiliki jangkauan 121,31 persen dari luas Kabupaten Mimika. Tinggi Wilayah sekitar 40 (m) diatas Permukaan Laut (DPL).

VISI

“Terwujudnya Distrik Mimika Baru Sebagai Institusi Pemerintahan Yang Mengedepankan Profesionalisme Dan Kepuasan Publik Dalam Memberikan Pelayanan Di Bidang Pemerintahan, Pembangunan Dan Pembinaan Kemasyarakatan Serta Mewujudkan Masyarakat Yang Mandiri, Agamis, Demokratis Produktif Serta Masyarakat Yang Maju, Aman, Tertib Dan Berdaya Saing”

MISI

1. Mewujudkan Pelayanan Masyarakat Yang Berkualitas Transparan Dan Akuntabel;
2. Peningkatan Sumber Daya Aparatur Distrik, Kelurahan Dan Kampung Dalam Pengelolaan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
3. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. Peningkatan Kualitas Kependudukan Dan Catatan Sipil;
5. Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.
6. Mengkoordinasi Pemeliharaan Sarana Dan Fasilitas Umum
7. Melaksanakan Pelayanan Masyarakat Yang Menjadi Ruang Lingkup Tugas Atau Belum Dapat Dilaksanakan.

3.3 Faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik perempuan di Distrik Mimika Baru

Faktor yang melatarbelakanginya perilaku masyarakat (pemilih) membuat keputusan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang dianggap dapat menampung dan mewujudkan impian serta harapan-harapannya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi politik perempuan agar pilkada Kabupaten Mimika berjalan dengan baik. Keberhasilan suatu pelaksanaan pemilihan umum dapat ditunjukkan dengan tingkat partisipasi politik masyarakat. Semakin tinggi tingkat partisipasi politik masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran terhadap politik yang tinggi. Sebagian besar perempuan Distrik Mimika terdorong untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan Bupati karena mereka menginginkan pemimpin yang mampu membawa perubahan dan kemajuan bagi masyarakat. Beberapa individu sudah memiliki pengetahuan yang tajam tentang perlunya memilih pemimpin yang bersimpati atau bias demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan hasil analisis tersebut, penulis kaitkan Teori Partisipasi oleh Samuel P. Huntington dan Joan Nelson aranya adalah

Kegiatan Pemilihan Umum, Kegiatan Organisasi, Lobby, Contacting Tindakan kekerasan dengan pengamatan penulis di lapangan, kegiatan pemilihan daerah masih terdapat hambatan yang merupakan penyebab rendahnya partisipasi politik masyarakat, sebagai berikut :

1. Trust Issue

Ketidakpercayaan tersebut pada dasarnya bersumber dari pengalaman sebelumnya, dimana kepala daerah sebelumnya tidak banyak memberikan sumbangsih terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama terakit dengan masalah pembangunan yang bisa dinikmati secara merata. Hal itu menyebabkan masyarakat enggan untuk memberikan hak suaranya dikarenakan kurangnya kepercayaan mereka terhadap calon kepala daerah. Kunci utama dari suksesnya suatu pemilihan kepala daerah adalah kepercayaan yang timbul dari perempuan terhadap calon kepala daerah. Masyarakat harus memiliki kepercayaan bahwa calon kepala daerah yang dipilihnya mampu memberikan kesejahteraan kepada mereka baik dalam hal ekonomi maupun sosial.

2. Pekerjaan masyarakat yang tidak dapat di tinggalkan

Pekerjaan masyarakat merupakan salah satu penyebab yang sering ditemui pada setiap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dikarenakan pekerjaan masyarakat. Faktor ini mempunyai kontribusi yang besar terhadap jumlah orang yang tidak memilih. Hal ini dikarenakan tuntutan pekerjaan masyarakat pemilih, yang apabila pekerjaan tersebut ditinggalkan maka kebutuhan pokok mereka dapat terganggu. Mereka beranggapan bahwa pekerjaan tersebut lebih penting daripada pemilihan umum yang berlangsung sehingga sulit bagi mereka untuk meninggalkan pekerjaan, terlebih bagi mereka yang sudah terikat kontrak kerja. Masyarakat lebih memilih untuk mencari nafkah, karena tanpa bekerja mereka tidak bisa menghidupi keluarganya.

3. Masyarakat yang tidak terdaftar sebagai DPT (Daftar Pemilih Tetap)

Masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT disebabkan beberapa yaitu, tidak berjalannya administrasi oleh panitia dengan baik sehingga tidak semua masyarakat terdaftar sebagai DPT, kemudian hal seperti KTP masyarakat yang sudah kadaluwarsa sehingga panitia tidak bisa menerima persyaratan, langsung ke tempat pendaftaran pemilih dan kaum lansia yang tidak dapat langsung ke tempat pemilihan.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pada pelaksanaan proses pemilihan kepala daerah di Kabupaten Mimika khususnya di Distrik Mimika Baru Penulis mendapatkan temuan penting yaitu melalui teori yang digunakan saat penelitian bahwa kurangnya perempuan dalam posisi kepemimpinan politik atau di parlemen sedikit banyak berdampak pada kebijakan kesetaraan gender dan mencegah solusi atas masalah utama yang dihadapi perempuan serta tingkat partisipasi perempuan dalam pemilu maupun pilkada. keterlibatan perempuan dalam kelompok politik seperti partai politik menjadi elemen penting dalam strategi pemenangan yang digunakan oleh kandidat potensial yang telah dicalonkan oleh partainya untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum. Diketahui bahwa minat perempuan untuk bergabung dalam organisasi tergolong tinggi namun kurangnya kesempatan atau wadah yang menampung. kurangnya partisipasi perempuan karena kurangnya informasi yang diterima oleh masyarakat ataupun kurangnya sosialisasi dari pihak penyelenggara mengakibatkan peminat perempuan dalam kepanitiaan menjadi minim.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penlitian dan pembahasan yang telah disampaikan, maka dapat diambil kesimpulan terkait partisipasi politik perempuan dalam pemilihan kepala daerah di Distrik Mimika Baru, antara lain Partisipasi politik perempuan dalam pilkada di Distrik Mimika Baru masih rendah dikarenakan beberapa faktor yang terjadi, hanya sebatas memberikan

suara dan tidak terlalu aktif dalam aktivitas terkait Pemilihan seperti kampanye dan sebagainya. Untuk memasukkan kebutuhan gender ke dalam kebijakan publik yang beragam dan menciptakan instrumen legislatif yang peka gender, partisipasi politik perempuan semakin diperlukan. Memanfaatkan teori Samuel P. Huntington dan Joan Nelson tentang keterlibatan politik, kegiatan pemilihan, lobi, kegiatan organisasi, kontak, dan tindakan kekerasan Di Kabupaten Mimika Baru, peneliti menemukan beberapa faktor yang mempengaruhi keterlibatan politik perempuan dalam pemilihan kepala daerah. Pilkada serentak mendapat dukungan kuat dari Pemkab sendiri. Proses sosialisasi melibatkan penciptaan ikatan sosial dengan masyarakat dan sosialisasi pengetahuan tentang tahapan, jadwal, dan program yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu. Keluarga, pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, penyandang disabilitas, komunitas, dan agama menjadi target demografi KPU Kabupaten Mimika. kemudian pemutakhiran data bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika serta sensus. Manajemen sumber daya juga mengacu pada kapasitas seseorang atau organisasi untuk melaksanakan tugas sedemikian rupa sehingga visi, misi, dan tujuan tercapai sambil memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga dilakukan berdasarkan oleh beberapa pihak saja.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis berharap agar kedepannya akan ada penelitian lanjutan dengan tema yang sejalan dapat menentukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Distrik Mimika Baru beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Budiarjo, M. (2008). Partisipasi dan Partai Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Budiarjo, M. (2014). Dasar - Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Budiarjo, M. (2016). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Huntington, S., & Nelson, J. (1990). Partisipasi Politik di Negara Berkembang. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moelong, & Lexy, J. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rostrakarya.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sundariningrum. (2001). Klasifikasi Partisipasi. Jakarta: Grasindo.
- Surahmad, W. (1990). Pengantar Penelitian Ilmiah. Bandung: Tarsito.
- Surbakti, R. (2007). Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Widisarana Indonesia .